



RENCANA KERJA

BKPSDM KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2023



KATA PEGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi dapat terselaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian ,dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan tahun lalu beserta program dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Rencana Kerja dirancang dan disusun berdasarkan sistem dan hierarki pembangunan dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik provinsi maupun kabupaten.

Rencana Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini semoga nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna untuk mencapai visi,misi,tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan, dan dapat diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi selama tahun 2023.

Sukabumi, Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI



Ir. H. Dadang Budiman, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630503 198803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Sukabumi	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi	31
2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Sukabumi	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023... ..	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD	42
3.3 Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023	42

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	45
4.1 Rencana Kerja Tahun 2023	45
V. PENUTUP	53
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	54
5.2 Rencana Tindak Lanjut	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSM s.d. Tahun 2022 Kabupaten Sukabumi.....	21
Tabel 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	33
Tabel 2.4 Data Analisis Review Renja BKPSDM Tahun 2023.....	35
Tabel 3.3 Identifikasi Terhadap Kebijakan RPJMD/RKPD Kabupaten Sukabumi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41
Tabel 3.4 Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2023..	42
Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Beserta Pagu Indikatif BKPSDM Kab Sukabumi Tahun 2023.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran teknis Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk unit kerja yang bermaterikan rencana Program/kegiatan perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah seharusnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang terarah, terencana dan berkelanjutan dalam merespon setiap perkembangan yang selalu memerlukan perbaikan baik menyeluruh maupun parsial agar sasaran dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diperlukan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang memuat langkah-langkah untuk mencapai berbagai kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra yang penyusunannya diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui proses musyawarah internal Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, forum Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk mencapai perencanaan pembangunan yang bersinergi dan saling terkait di Kabupaten Sukabumi. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dirancang dan disusun berdasarkan sistem dan hierarki pembangunan dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik pusat maupun provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dinas/instansi terkait, termasuk didalamnya evaluasi atas berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan serta arah organisasi dalam bertindak, berbuat dan menentukan program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan visi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu satu tahun. Selain itu Rencana Kerja juga merupakan sarana penjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan yang prosesnya tidak pernah

berakhir. Dengan demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah akan mengarahkan organisasi untuk berkiprah dan berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan baik Perangkat Daerah maupun daerah dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana Kerja tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan pedoman dan sebagai dasar penyesuaian nama program kegiatan yang tercantum dalam nomenklatur terbaru pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan hal-hal diatas, maka diperlukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 yang baik dan optimal berdasarkan kebutuhan-kebutuhan prioritas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna menjalankan fungsi pemerintahannya yakni Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia agar mampu mencapai tujuan dan harapan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, mengacu kepada beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 99 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
20. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2020;
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 tanggal 28 Agustus 2020;
22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai arah serta langkah-langkah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan;
2. Sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan pembangunan tahunan;
3. Sebagai dasar dalam menetapkan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM) aparatur;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
5. Sebagai dasar dalam menyusun sinergitas program dalam pelaksanaan tugas antara Perangkat Daerah maupun dengan lembaga baik tingkat Pusat, Provinsi;
6. Sebagai dasar dalam menentukan program-program prioritas Perangkat Daerah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
7. Sebagai pedoman dalam penyesuaian implementasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan program, kegiatan serta sub kegiatan pada penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah :

1. Menjamin terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, sinergis dan terpadu antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Untuk memudahkan dan penilaian terhadap tolok ukur serta hasil capaian kinerja;
4. Sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugas guna mempercepat pencapaian target serta pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDM
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM 2023
- 3.3. Program dan Kegiatan BKPSDM 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

- 4.1. Rencana Kerja Tahun 2023

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Sukabumi

Rencana kerja merupakan rencana tahunan dari rencana strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi pelaksanaan kinerja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan kinerja dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM yang menyebabkan perubahan target dan munculnya target kinerja baru. Namun secara keseluruhan dinamika penguasaan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai dasar awal dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b) Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2019, memiliki 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) target indikator kinerja yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, adapun hasil perhitungan/perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2022		Capaian %
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kapabilitas ASN yang Profesional	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	72,52	76,80	106
		Indeks Profesional ASN	Nilai	52,32	65,90	126
Rata-rata capaian						116

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dapat diberikan penjelasan untuk hasil capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perubahan. Penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja ke-1 Indeks Profesional ASN

Pada Tahun 2021 pencapaian indicator profesionalitas ASN ditargetkan sebesar 52, 32. Nilai tersebut dihitung berdasarkan rumus perhitungan IP ASN yang mencakup 4 aspek penilaian yaitu kualifikasi (40%), kompetensi (25%), kinerja (30%) dan disiplin (5%). Perhitungan pencapaian nilai IP ASN tersebut disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Realisasi capaian nilai indeks profesionalitas ASN sebesar 65,90, sehingga capaian kinerjanya sebesar 126% (**SANGAT TINGGI**). Pencapaian indikator tersebut dicapai melalui program Kepegawaian Daerah yang diimplementasikan dalam 4 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, dimana target indicator dari masing-masing kegiatan tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
 - Dokumen Usulan Kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi tahun 2021 sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%
 - Jumlah peserta Bimtek penyusunan Kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi sebanyak 168 orang dari target yang ditetapkan 168 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%.
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
 - Penyerahan petikan SK CPNS formasi tahun 2019 sebanyak 193 petikan dari target yang ditetapkan 193 petikan, sehingga capaian kinerjanya 100%

- Pengangkatan PPPK tahap 1 tahun 2019 sebanyak 638 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 638 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%
 - Jumlah peserta ujian CPNS tahun 2021 sebanyak 3547 oarang dari target yang ditetapkan 6000 orang, sehingga capaiannya 59,12%
 - Jumlah peserta ujian PPPK tahun 2021 sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan 8000 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%, hal ini dikarenakan penyelenggaraan ujian PPPK diselenggarakan secara nasional oleh KEMNDIKBUD RISTEK.
- c) Sub Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah Pengangkatan CPNS menjadi PNS Formasi 2019 sebanyak 195 orang dari target yang ditetapkan 195 orang, sehingga capaiannya 100%
 - Jumlah peserta penyerahan berita acara sumpah PNS formasi 2018 sebanyak 473 dari target yang ditetapkan 475 orang. Sehingga capaian kinerjanya 99,58%. Hal ini dikarenakan terdapat 2 orang peserta meninggal dunia.
- d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu:
- Jumlah usulan PNS yang pensiun sebanyak 700 orang dari target yang ditetapkan 700 orang. Sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Jumlah peserta rekonsiliasi data pensiun tahun 2022 sebanyak 85 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 85 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- e) Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- Pelayanan rekomendasi pemeriksaan kesehatan PNS selama 12 bulan dari target yang ditetapkan 12 bulan, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Jumlah calon purnabakti yang mengikuti pembekalan sebanyak 60 orang dari target yang ditetapkan 60 orang, sehingga capaian kerjanya 100%.
- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah pemutakhiran dan sinkronisasi data PNS sebanyak 10.000 orang dari target yang ditetapkan 10.000 orang, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Penilaian kinerja dan disiplin (SIMPEG, ELOK, SIM, TUNJANGAN, SIDA) selama 12 bulan dari target yang di tetapkan 12 bulan, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Pelayanan KARPEG, KARIS dan KARSU PNS sebanyak 100 orang dari target yang ditetapkan 100 orang, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Terintegrasi mesin absensi antar perangkat daerah sebanyak 340 orang dari target yang ditetapkan 340 orang, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Pelayanan perbaikan data ASN sebanyak 50 orang dari target yang ditetapkan 50 orang, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Tersedianya informasi di website resmi BKPSDM selama 12 bulan dari target yang ditetapkan 12 bulan sehingga, capaian kerjanya 100%;
 - Tenaga ahli pendampingan aplikasi SIMPEG terintegrasi kinerja selama 12 bulan dari target yang ditetapkan 12 bulan, sehingga capaian kerjanya 100%;

- Tersedianya pojok widyaiswara selama 2 bulan dari target yang ditetapkan 2 bulan, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Tersedianya layanan TAPERA sesuai ketentuan selama 2 bulan dari target yang ditetapkan 2 bulan, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Jumlah peserta rekonsialisasi pemutakhiran data mandiri (PDM) sebanyak 170 orang dari target yang ditetapkan 170 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- 2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub kegiatan pengelolaan Mutasi ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Pengelolaan mutasi JPT & JA sebanyak 1.252 surat dari target yang ditetapkan sebanyak 900 surat, sehingga capaian kinerjanya 139,11%;
 - Pelantikan/ alih tugas jabatan sebanyak 4 kali dari target yang ditetapkan 4 kali, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- b) Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah SK dan petikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang diterbitkan sebanyak 1.496 petikan dari target yang ditetapkan sebanyak 1.500 petikan, sehingga capaian kinerjanya 99,73%;
 - Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebanyak 593 surat dari target yang ditetapkan sebanyak 500 surat, sehingga capaian kinerjanya 118,60%
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :

- Pelaksanaan seleksi terbuka sebanyak 2 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 2 kali, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah peserta peningkatan kompetensi ASN sebanyak 5 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 5 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Dokumen IP ASN sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Jumlah peserta sertifikasi camat sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 6 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal ini dikarenakan refocusing anggaran.
- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center. Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
- Profil kompetensi ASN sebanyak 175 profil dari target yang ditetapkan sebanyak 215 profil, sehingga capaian kinerjanya 81.40%;
 - Jumlah bank soal assessment sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN . keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah peserta pendidikan gelar dan non gelar sebanyak 7 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 50 orang. Sehingga capaian kinerjanya 140%;

- Surat keterangan ijin belajar sebanyak 156 surat dari target yang ditetapkan sebanyak 150 surat, sehingga capaian kinerjanya 104%;
 - Jumlah petikan pencantuman gelar sebanyak 86 petikan dari target yang ditetapkan sebanyak 50 petikan, sehingga capaian kinerjanya 172%.
- d) Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Pengambilan sumpah jabatan sebanyak 571 orang dari target sebanyak 350 orang, sehingga capaian kinerjanya 163,14%.
- e) Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah SK pengangkatan, perpindahan, penempatan kenaikan jenjang, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional sebanyak 297 petikan dari target sebanyak 800 petikan, sehingga capaian kinerjanya 37,13%.
- 4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu:
- Jumlah peserta bimtek aplikasi kepegawaian sebanyak 102 orang dai target yang ditetapkan sebanyak 102 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Persentase capaian kinerja pegawai sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerjanya 100%;
 - Pelayanan konseling kinerja pegawai selama 12 bulan dari target yang ditetapkan selama 12 bulan, sehingga capaian kinerjanya 100%.

- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah penerima penghargaan ASN berprestasi sebanyak 4 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 4 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%
 - Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan sebanyak 70 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 70 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah penerima penghargaan satyalencana sebanyak 92 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 25 orang, sehingga capaian kinerjanya 368%.
- d) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu:
- Jumlah peserta pembinaan mental aparaturnya sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 85 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal ini dikarenakan refocusing anggaran.
 - Pembinaan kepegawaian kewilayahan sebanyak 4 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kali, sehingga capaian kinerjanya 100%
 - Evaluasi kehadiran kerja dan apel pegawai sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebanyak 80%, sehingga capaian kinerjanya 100%;
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Persentase penanganan pengaduan sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaian kinerjanya 100%.

B. Indikator kinerja ke – 2 : Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Pencapaian Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sebesar 72,52. Realisasi capaian presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal sebesar 76,80. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 106% (**SANGAT TINGGI**). Pencapaian indicator tersebut di capai melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang di implementasikan dalam 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dimana target indikator dari masing-masing kegiatan tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
 - Dokumen evaluasi pasca pelatihan sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya 100%
 - Dokumen pasca pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 1 dokumen dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya 100%
 - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :

- Jumlah sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 0 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal tersebut dikarenakan refocusing anggaran peserta diklat teknis informasi teknologi;
- Jumlah peserta diklat teknis pengelolaan barang dan jasa sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 0 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal tersebut dikarenakan refocusing anggaran;
- Jumlah peserta diklat teknis pemeliharaan infrastruktur wilayah sebanyak 28 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 28 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%;
- Jumlah peserta diklat teknis legal drafting sebanyak 35 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 35 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%;
- Jumlah peserta diklat teknis sosio kultural sebanyak 0 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 0 orang, sehingga capaian kinerjanya 0%. Hal tersebut dikarenakan refocusing anggaran;
- Jumlah peserta pembekalan teknis reakreditasi bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan sebanyak 20 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 20 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%;
- Jumlah peserta pembekalan teknis budaya kerja bagi alumni latsar tahun 2021 sebanyak 194 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 194 orang, sehingga capaian kinerjanya 100%.

2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Keluaran dari kegiatan tersebut yaitu :
- Sertifikasi akreditasi sebanyak 0 dokumen dari target yang ditetapkan 1 dokumen, sehingga capaian kerjanya 0%. Hal ini dikarenakan sertifikasi akreditasi dilaksanakan di tahun 2022
- b) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Keluaran dari sub kegiatan tersebut yaitu :
- Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dasar CPNS sebanyak 194 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 194 orang, sehingga capaian kerjanya 100%;
 - Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 79 orang dari target yang ditetapkan 80 orang, sehingga capaian kerjanya 98,75%. Hal ini dikarenakan terdapat 1 orang meninggal dunia.
 - Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan administrator sebanyak 7 orang dari target yang ditetapkan 7 orang, sehingga capaian kerjanya 100%.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSM s.d. Tahun 2022
Kabupaten Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra PERANGKAT DAERAH) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) Th 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH tahun 2022)	Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022
					Target Program dan Kegiatan (Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH tahun 2021)	Realisasi Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	
		Video Selayang Pandang BKPSDM	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket		-	
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen RKA Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH	Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	

	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- PERANGKAT DAERAH	Dokumen DPA Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH	Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2020 Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2020	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen gaji pegawai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH	Laporan Keuangan Tahun 2021	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang dididik dan di latih	15	0	15	0	15	0	15
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Keuangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang

1	2	3	4	5	6		8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
		PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	50 Orang	-
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis		27 Jenis	
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Beli	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang di Beli	43 Jenis	43 Jenis	43 Jenis	43 Jenis		43 Jenis	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kantor yang di Beli	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH	Penyelenggaraan rapat PERANGKAT DAERAH	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	3 unit	3 unit	3 unit		3 unit	
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	10 unit	10 unit	10 unit		10 unit	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		air minum, telepon, iklan dan material kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
		jasa internet/hosting	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Non PNS	20 Orang	20 Orang	20 Orang		20 Orang	
		Jasa Pemateri pengajian rutin aparatur	2 Orang	2 Orang	2 Orang		2 Orang	
		Jasa Pembuangan Limbah Non Medis	12 Orang	12 Orang	12 Orang		12 Orang	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit		15 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	7 unit	7 unit	7 unit		7 unit	
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah komputer yang dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit		10 unit	

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
		Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit		30 unit	
		pemeliharaan instalansi listrik	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali	
02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							
2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							
	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Dokumen pasca pelatihan						
		Dokumen pasca pelatihan kepemimpinan pengawas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Dokumen pasca pelatihan kepemimpinan pengawas	Dok	Dok	Dok		Dok	
	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0 orang	0 orang	0 orang		0 orang	
		Jumlah peserta diklat teknis informasi teknologi						
		Jumlah peserta diklat teknis pengelolaan barang dan jasa	0 orang	0 orang	0 orang		0 orang	
		Jumlah peserta diklat teknis pemeliharaan infrastruktur wilayah	28 orang	28 orang	28 orang		28 orang	
		Jumlah peserta diklat teknis legal drafting	35 orang	35 orang	35 orang		35 orang	
		Jumlah peserta diklat teknis sosio kultural	0 orang	0 orang	0 orang		0 orang	
		Jumlah peserta pembekalan teknis reaktivitas bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan	20 orang	20 orang	20 orang		20 orang	
		Jumlah peserta pembekalan teknis budaya kerja bagi alumni latsar tahun 2021	194 orang	194 orang	194 orang		194 orang	

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							
03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Akreditasi	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	
07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar CPNS	194 orang	194 orang	194 orang	194 orang	194 orang	
		Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pengawas	80 orang	79 Orang	80 orang	79 Orang	80 orang	
		Jumlah PNS yg mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan administrator	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	
02.	Program Kepegawalan Daerah							
2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN							
02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen usulan kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Jumlah peserta bimtek penyusunan kebutuhan ASN melalui aplikasi e-formasi	186 orang	186 orang	186 orang	186 orang	186 orang	
03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Petikan SK CPNS Formasi tahun 2019	193 petikan	193 petikan	193 petikan	193 petikan	193 petikan	
1		Pengangkatan PPPK tahap 1 tahun 2019	638 orang	638 orang	638 orang	638 orang	638 orang	

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
		Jumlah peserta Ujian CPNS tahun 2021	6.000 orang	3.547 orang	6.000 orang	3.547 orang	6.000 orang	
		Jumlah peserta Ujian PPPK tahun 2021	8.000 orang	0 orang	8.000 orang	0 orang	8.000 orang	
04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi 2019	195 orang	195 orang	195 orang	195 orang	195 orang	
		Jumlah Peserta Penyerahan Berita Acara Sumpah PNS Formasi Tahun 2018	475 orang	473 orang	475 orang	473 orang	475 orang	
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usulan PNS yang pensiun	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	
		Jumlah peserta rekonsiliasi data pensiun tahun 2022	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	85 orang	
08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rekomendasi pemeriksaan kesehatan PNS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Jumlah calon purnabakti yang mengikuti pembekalan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	
		Paran serta anggota KORPRI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pemutakhiran dan sinkronisasi data PNS	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	
		Jumlah peserta peningkatan Kualitas Data Kepegawaian	164 Peserta	164 Peserta	164 Peserta	164 Peserta	164 Peserta	
		Tenaga Ahli Maintenance Server SIM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Penilaian Kinerja dan Disiplin(SIMPEG SIAP, ELOK,SIM Tunjangan, SIDAK)						
		Pelayanan Karpeg Karlis dan Karsu	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
		Terintegrasinya Mesin Absensi Antar Perangkat Daerah Pelayanan perbaikan Data ASN	340 orang	340 orang	340 orang	340 orang	340 orang	
		Tersedianya Informasi di Website Resmi BKPSDM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
		Tenaga Ahli Pendampingan Alisasi SIMPEG	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	
		Terintegrasi Kinerja Tersedianya pojok widyaiswara	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	
		Tersedianya layanan tapera sesuai ketentuan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	
		Jumlah peserta rekonsiliasi pemuktahiran data mandiri (PDM)	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	
2.02	Mutasi dan Promosi ASN							
	01	Pengelolaan Mutasi ASN	900 surat	1.252 surat	900 surat	1.252 surat	900 surat	
		Pelantikan/ Alih Tugas Jabatan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.500 petikan	1.486 orang	1.500 petikan	1.496 orang	1.500 petikan	
		Jumlah SK dan petikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala yang diterbitkan						
		Jumlah Peserta Ujian Dinas dan ujian PI	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	100 peserta	
		Surat Pemberitahuan KGB	500 surat	593 surat	500 surat	593 surat	500 surat	
	03	Pengelolaan Promosi ASN	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
		Pelaksanaan Seleksi Terbuka						

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
2.03	Pengembangan Kompetensi ASN							
	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta peningkatan Kompetensi ASN Dokumen IP ASN	5 Orang 1 Dokumen	5 Orang 1 Dokume	5 Orang 1 Dokume	5 Orang 1 Dokume	5 Orang 1 Dokume	
		Jumlah peserta Sertifikasi Camat	6 orang	0 orang	6 Orang	0 orang	6 orang	
	02 Pengelolaan Assessment Center	Profil Kompetensi ASN Jumlah Bank Soal Assessment	215 profil 1 dokumen	175 profil 1 dokumen	215 profil 1 dokumen	175 profil 1 dokumen	215 profil 1 dokumen	
	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Peserta Pendidikan Gelar dan Non Gelar Surat Keterangan Ijin Belajar	5 orang 150 surat	7 orang 156 surat	5 orang 150 surat	7 orang 156 surat	5 orang 150 surat	
	13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah petikan pencantuman gelar Pengambilan sumpah jabatan	50 petikan 350 orang	86 petikan 571 orang	50 petikan 350 orang	86 petikan 571 orang	50 petikan 350 orang	
	14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta pembinaan Jabatan fungsional Jumlah SK Pengangkatan, Perpindahan penempatan kenaikan jenjang, pemberhentian sementara, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	178 Orang 800 petikan	0 orang 297 petikan	178 Orang 800 petikan	0 orang 297 petikan	178 Orang 800 petikan	
2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							

1	2	3	4	5	6	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)
02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah peserta bimbingan aplikasi kepegawaian	102 Orang	102 Orang	102 Orang		102 Orang	
		Persentase Capaian Kinerja pegawai	80 %	80 %	80 %		80 %	
		Pelayanan Konseling Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah penerima penghargaan ASN berprestasi	4 orang	4 orang	4 orang		4 orang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	70 orang	70 orang	70 orang		70 orang	
05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah penerima penghargaan Satya Lencana	25 orang	92 orang	25 orang		25 orang	
07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah peserta pembinaan mental aparatur	65 orang	85 orang	85 orang		85 orang	
		Pembinaan kepegawaian kewilayahan	4 kali	4 kali	4 kali		4 kali	
		Evaluasi kehadiran kerja dan apel pegawai	4 kali	4 kali	4 kali		4 kali	
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penanganan pengaduan	80 %	80 %	80 %		80 %	
09	Pelayanan Proses Izin Percerahan Pegawai	Persentase penanganan perceraian	0 %	0 %	0 %		0 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi

Kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Sukabumi mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi adalah meliputi tugas:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kinerja, Disiplin dan Penghargaan;
- b. Mutasi dan Promosi ASN;
- c. Pengembangan Kompetensi ASN;
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi, penyelenggaraan pengadaan ASN, pengkoordinasian administrasi pemberhentian pegawai, penyajian informasi kepegawaian, pengelolaan data pensiun dan jamunan hari tua, dan pengkoordinasian perlindungan pegawai.

Bidang Kinerja, Disiplin dan Penghargaan, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengkoordinasian penggajian dan tunjangan, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja, dan disiplin, pengelolaan cuti pegawai, penyelenggaraan fasilitasi pemberian penghargaan, pengkoordinasian pengaduan sikap, perilaku, penanganan PNS sakit dan perceraian, penyelenggaraan fasilitasi lembaga profesi ASN, dan pengkoordinasian Gerakan Disiplin Aparatur (GDA).

Bidang Mutasi dan Kepangkatan, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap penyelenggaraan proses mutasi dan promosi jabatan, pengkoordinasian kenaikan pangkat dan jabatan, pengelolaan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian masa kerja, fasilitasi penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional, dan pengelolaan jabatan fungsional.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap penyelenggaraan pengembangan standar kompetensi jabatan, perencanaan kebutuhan diklat, penyelenggaraan

diklat manajerial, diklat teknis dan fungsional, penyusunan standar jabatan sebagai bahan penyusunan pola karier, penyelenggaraan *talent management* dan *talent pooling* ASN, penyusunan pedoman pengembangan karier dan pola karier, penyelenggaraan seleksi untuk penempatan ASN dalam jabatan administrator dan pengawas.

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel 2.3
ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	BKK	Target Rencana 2016 – 2021			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa	
				Tahun 2018 (Thn. n-3)	Tahun 2019 (Thn. n-2)	Tahun 2020 (Thn. n-1)	Tahun 2021 (Thn. n)	Tahun 2022 (Thn. n+1)	Tahun 2019 (Thn. n-3)	Tahun 2020 (Thn. n-1)	Tahun 2021 (Thn. n)		Tahun 2022 (Thn. n+1)
		3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan												
	- Diaklat PIM II							11 Orang					
	- Diaklat PIM III							80 Orang					
	- Diaklat PIM IV							80 Orang					
2	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis							90 Orang					
3	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan							207 Orang					
4	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai							100,64%					
5	Tingkat partisipasi anggota KORPRI							100%					
6	Persentase pelanggaran disiplin							0,232%					
7	Jumlah pegawai yang memperoleh Ijin belajar							380 Orang					
8	Hasil Kajian dalam Perencanaan Kebutuhan												
10	Analisis Kebutuhan Diklat							1 Dokumen					
11	Jumlah jenis diklat yang diakreditasi/re-akreditasi							1 Sertifikat					
12	Evaluasi Purna Diklat							1 Dokumen					
13	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			62,52%	19,32%	67,52%	67,52%		55,69%	19,30%	62,52%	67,52%	
14	Indeks Profesionalitas ASN			49,32	26,12	50,32	52,32		45,99	24,80	49,32	50,32	

2.3 Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Sukabumi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi dalam mengambil strategi arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai;
3. Penataan dan Pola karier berbasis kompetensi dan sistem rekrutmen terbuka;
4. Disiplin dan netralitas PNS yang masih harus di tingkatan;
5. Tingginya kebutuhan pegawai ditengah-tengah moratorium dan pension PNS;
6. Pelayanan administrasi kepegawaian yang masih harus ditingkatkan;
7. Belum adanya pemerataan kesejahteraan berbasis kinerja dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dasar;
8. Kurangnya sinergitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan kediklatan.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Renstra PD, serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Data Analisis Review Renja BKPSDM Tahun 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	2 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	3 Meningkatnya kapabilitas ASN yang profesional	4 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5 Indeks Profesional ASN	6 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	7 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Evaluasi Pemberhentian ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN
					Mutasi dan Promosi ASN	
					Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengelolaan <i>Assessment Center</i>

			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pengembangan Kompetensi Teknis	<p>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</p> <p>Evaluasi Disiplin ASN</p> <p>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi</p> <p>Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan</p> <p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi</p> <p>Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional</p> <p>Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota</p> <p>Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan</p>
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

						<p>Kompetensi, dan Sumber Belajar</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga</p> <p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran</p> <p>Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional</p> <p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p> <p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi menampung usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) sebagai saran masukan dalam peningkatan pelayanan organisasi dan dapat disampaikan melalui website BKPSDM Kabupaten Sukabumi yaitu *bkpsdm.sukabumikab.go.id*.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah, maka sasaran prioritas dibidang kepegawaian adalah dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintah, semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Kepuasan layanan pemerintah dan menurunnya pengaduan terhadap pelayanan dibidang kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengagendakan 6 (enam) program kerja prioritas nasional untuk tahun 2023. Keenam agenda prioritas BKN yang dicanangkan untuk direalisasikan pada tahun 2023 tersebut meliputi:

1. Revitalisasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN);
2. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
3. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D;
4. Sistem Informasi ASN Terintegrasi;
5. Sistem Informasi Talent Pool ASN; dan
6. Penegakan Disiplin ASN.

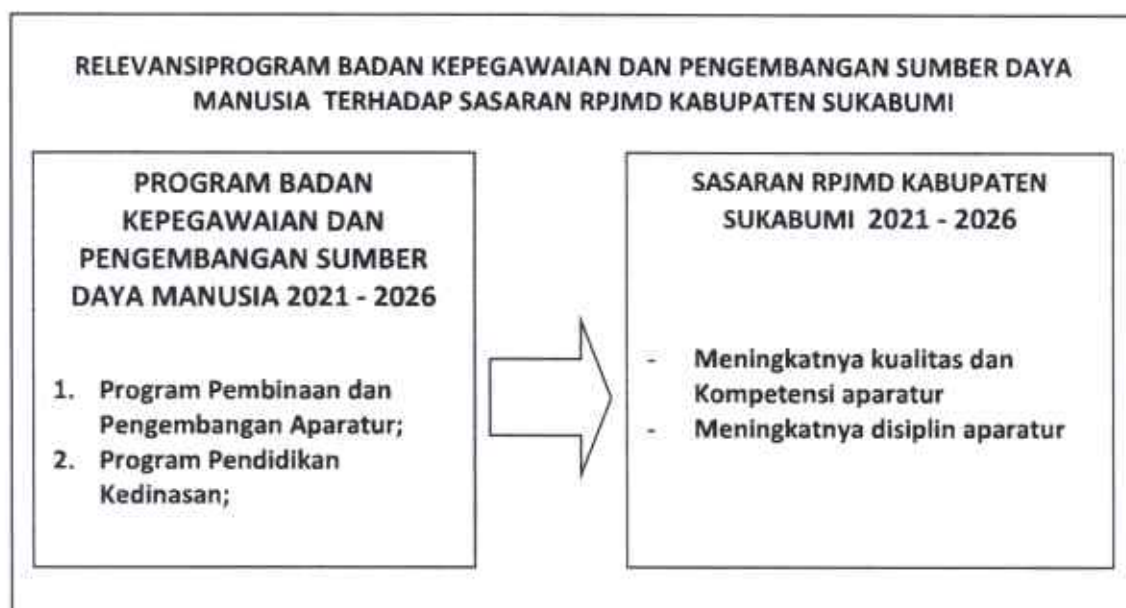
Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 berfokus terhadap peningkatan profesionalitas Aparatur dan peningkatan Kompetensi Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Manajerial ataupun Teknis yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi, serta telaahan lokus, fokus dan sektoral atas Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 memiliki relevansi yang sangat signifikan.

Relevansi antara program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bila dihubungkan dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Identifikasi Terhadap Kebijakan RPJMD/RKPD Kabupaten Sukabumi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**



3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH

Mengacu kepada konsep pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Professional dan Akuntabel.

Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas ASN yang Profesional dan Akuntabel

3.3. Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023

Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan implementasi dari Misi ke-4 Kabupaten Sukabumi yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel**. Pada tahun 2023 dalam pencapaian IKU Bupati dan IKU PERANGKAT DAERAH, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi merencanakan 2 (dua) program kemudian dijabarkan menjadi 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, yang disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2023

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2
5.03.5.04.0.00.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiannya Beserta Atribut Kelengkapannya
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Seluruh program dan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1 Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan selama 1 (satu) tahun ke depan, sebagai salah satu bahan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 serta prakiraan maju pendanaan tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kegiatan Beserta Pagu Indikatif Renja BKPSDM Kab Sukabumi Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Praktikan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Tingkat Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cetakan Pening	Target Capaian Kinerja		Kelembagaan/ Dana/ Paga Indikatif (Rp.)
						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
0		UNSUR PERUNJANG URUBAN PEMERINTAH											
0		SEPEKAWAN											
0		PROGRAM PENUNJANG URUBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
0	2.01	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukung Capaian Perencanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 2 Dokumen	100%	0,000,000	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000
0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukung Capaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 1 Dokumen	100%	0,000,000	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000
0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukung Capaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 1 Dokumen	100%	0,000,700	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000
0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukung Capaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 1 Dokumen	100%	0,000,700	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000
0	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukung Capaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 1 Dokumen	100%	0,000,000	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000
0	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukung Capaian Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Ciantayan, Lembangmah	100% 4 Laporan	100%	0,000,000	FENDAPATA NABU DAERAH Dana Transfer Umum-Dana Akasi Umum		Perentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	0,000,000

Kode	Uraian/ Bidang Usaha/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Catatan Penting	Target	Kebutuhan Dasar				
					Level Output Kegiatan	Kelebihan Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Bentuk Dana	
5 3 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penerimaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	73 Orang/ Bulan	100%	5.000.000,00	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	5.000.000,00	5.000.000,00
5 3 1 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SPOD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SPOD dan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SPOD dan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	1 Laporan	100%	3.000.000,00	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	3.000.000,00	3.000.000,00
5 3 1 2.02	Pengaturan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program/ Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program/ Realisasi Anggaran	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100 Dokumen	100%	5.000.000,00	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	5.000.000,00	5.000.000,00
5 3 1 2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembayaran ASH yang memiliki keaslian korupansi	Jumlah Paket Kepegawaian Dinas Beasiswa/ Hibah/ Kelengkapan	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100% BB Paket	100%	285.000.000	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	285.000.000	285.000.000
5 3 1 2.03	Pembayaran ASH yang memiliki keaslian korupansi	Pembayaran ASH yang memiliki keaslian korupansi	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan/ Uraian/ Dana	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100% BB Orang	100%	249.500.000	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	250.000.000	250.000.000
5 3 1 2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembayaran Perencanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	Jumlah Paket Kepegawaian/ Lainnya/ Perencanaan/ Anggaran/ yang Disiapkan	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100% Paket	100%	859.441.500	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	100%	859.441.500	859.441.500
5 3 1 2.08	Pembayaran Perencanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	Pembayaran Perencanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	Jumlah Paket Kepegawaian/ Lainnya/ Perencanaan/ Anggaran/ yang Disiapkan	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100% Paket	100%	50.000.000	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	100%	50.000.000	50.000.000
5 3 1 2.08	Pembayaran Perencanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	Pembayaran Perencanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	Jumlah Paket Kepegawaian/ Lainnya/ Perencanaan/ Anggaran/ yang Disiapkan	Dukung Capaian Penilaian Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100% Paket	100%	299.500.000	PENDAPATA N-ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abstrak Umum	Perencanaan Pelaksanaan Penjualan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Perencanaan	100%	300.000.000	300.000.000

Kode	Uraian Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktikan Maju Bangsa Tahun 2024		
		Capaian Program	Kolom Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Leakl Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan				Tingkat Ulang	Tingkat Ulang	
5 3 1 2.06 3	Penyediaan Fasilitas Rutih: Tangin	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Paket Perishin Rumah Tangga yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	39.883.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	39.000.000	
5 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logam Kator	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logam Kator yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	10.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	10.000.000	
5 3 1 2.06 5	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengiriman	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	55.500.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	55.000.000	
5 3 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	45.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	45.000.000	
5 3 1 2.06 8	Fasilitas Kurang Tany	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitas Kurang Tany yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	100.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	100.000.000	
5 3 1 2.06 9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Komunitas SKPD	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	100.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	100.000.000	
5 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamarintah Daerah							389.886.000				389.000.000	
5 3 1 2.07 1	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operatif dan Lain-lain	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operatif dan Lain-lain yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%		PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%		
5 3 1 2.07 5	Pengadaan Mobil	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Paket Mobil yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	90.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	90.000.000	
5 3 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Jumlah Unit Sarana dan Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disiapkan	Dukungin Capain Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	Kab. Sukabumi, Cianjuran, Lembang	100%	100%	200.000.000	PENDAPATA, N.ASLI, DAERAH (PAD), Dana Transfer Urum-Dana Abkasi Urum	Penerbitan Peranahan Kebutuhan Urum Pelayaran Perikanan	100%	200.000.000	

Kode	Uraian/ Bidang/ Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022			Rencana Mula Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keleuan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target
5 3 1 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						943.384.096			947.800.000
5 3 1 2 08 1	Pembinaan Pemenuhan kebutuhan jasa lingkungan perkarantena	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Karantina Sumber Daya Air dan Limbah yang Disediakan	Dukung Capaian Pembinaan Pemenuhan kebutuhan jasa lingkungan perkarantena	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% Laporan	100%	355.699.000		100%	350.000.000
5 3 1 2 08 2	Pembinaan Pemenuhan kebutuhan jasa lingkungan perkarantena	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Karier yang Disediakan	Dukung Capaian Pembinaan Pemenuhan kebutuhan jasa lingkungan perkarantena	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% Laporan	100%	388.399.000		100%	387.000.000
5 3 1 2 09	Pemeliharaan Bering Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.337.616.008			970.000.000
5 3 1 2 09 1	Penyediaan Jasa Perbaikan, Biaya Pemeliharaan, Perek dan Perbaikan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibantu PPK dan Peternaknya	Dukung Capaian Pembinaan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 20 Unit	100%	548.950.000		100%	420.000.000
5 3 1 2 09 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirubah-Bali	Dukung Capaian Pembinaan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 2 Unit	100%	600.000.000		100%	300.000.000
5 3 1 2 09 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Dirubah-Bali	Dukung Capaian Pembinaan sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 0 Unit	100%	250.080.000		100%	250.000.000
5 3 2	PROGRAM KEPEDAWAHAN DAERAH						8.008.008.008			11.819.800.000
5 3 2 1	Pengadaan, Peralaksanaan dan Informasi Kepegawaian ASN						2.713.415.000			3.321.450.000
5 3 2 1 1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dukung Capaian Pelaksanaan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 2 Dokumen	100%	159.884.750		100% 2 Dokumen	0 1000.000
5 3 2 1 2	Konfirmasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Konfirmasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dukung Capaian Pelaksanaan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 1 Dokumen	100%	1.400.099.500		100% 1 Dokumen	1000.000.000
5 3 2 1 3	Pengadaan Dimensi Kualifikasi ASN	Pengadaan Dimensi Kualifikasi ASN	Pengadaan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Subah, Ciamayan, Lumburuwah	100% 1 Laporan	100%	18.099.750		100% 1 Laporan	03.100.000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Kecapaian Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Program	Kuantitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Rebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											To k UBR	Target	
0 3 2 2.01 0	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Informasi Administrasi Pemerintahan	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	2 Dokumen	100%	12.096.750	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	12.850.000
0 3 2 2.01 0	Fasilitas Lembaga Promosi ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Lembaga Promosi ASN yang Didistribusi	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	1 Lembar	100%	124.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	484.000.000
0 3 2 2.02 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Data Kepegawaian	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	10 Dokumen	100%	37.400.800	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	242.000.000
0 3 2 2.02 0	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Data Kepegawaian	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	2 Dokumen	100%	80.000.000	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	242.000.000
0 3 2 2.02 0	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Promosi Tinggi, Jabatan Administratif, dan Mutasi ASN antar Daerah	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	4 Dokumen	100%	400.000.000	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	600.000.000
0 3 2 2.02 0	Pengembangan Karir ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Pengalihan Karir ASN	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	4 Dokumen	100%	700.000.250	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	988.000.000
0 3 2 2.02 0	Pengembangan Promosi ASN	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Promosi ASN	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	3 Dokumen	100%	400.000.000	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kualifikasi ASN	04 Nilai	600.000.000
0 3 2 2.02 0	Pengembangan Kompetensi ASN								1.947.375,00	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum			3.989.860.000
0 3 2 2.03 0	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Menerima Kapasitas	Dukung Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	800 Orang	100%	109.998.800	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	04 Nilai	1.000.000
0 3 2 2.03 0	Peningkatan Asas-asas dan Budaya Kerja ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Asas-asas dan Budaya Kerja ASN	Dukung Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	2 Dokumen	100%	1295.345.350	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	04 Nilai	2.888.000.000
0 3 2 2.03 0	Peningkatan Administrasi dan Sistem ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Administrasi dan Sistem ASN	Dukung Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lamurias	04 Nilai	10 Dokumen	100%	100.000.000	PENDAPATA N ABLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasa Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	04 Nilai	303.000.000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Problema Maja Rencana Tahun 2024			
			Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Calatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Tanggal
5 3 2 2.04	Pengelolaan Peningkatan ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kemampuan	Dukung Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	5 Orang	80%	843.028.750	DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	786.500.000
5 3 2 2.04	Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan, Panduan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Dokumen	80%	90.220.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	810.000.000
5 3 2 2.04	Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Dokumen	80%	90.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	815.000.000
5 3 2 2.04	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Laporan	80%	10.489.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	825.500.000
5 3 2 2.04	Pengelolaan Pembinaan Pegawai	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah ASN yang Dibebaskan Penghargaan	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	50 Orang	80%	270.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	363.000.000
5 3 2 2.04	Pengelolaan Tenda Jasa bagi Pegawai	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Tenda Jasa	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	20 Orang	80%	250.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	367.340.000
5 3 2 2.04	Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penghargaan dan Tenda Jasa Aparatur	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penghargaan dan Tenda Jasa Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Dokumen	80%	200.000.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	242.000.000
5 3 2 2.04	Pembinaan Daipin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Orang	80%	80.224.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	232.220.000
5 3 2 2.04	Pengelolaan Pembinaan dan Penghargaan Daipin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Jumlah Laporan Hasil Penghargaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lumburuwah	28 Nilai	10 Laporan	80%	28.800.000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Abjasi Umum	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Daipin	28 Nilai	467.770.000

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lo Kalat Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Sub Kegiatan				Tingkat Ukurl	Tertarget	
5.3.2.2.04	Pelaksanaan Proses dan Pencapaian Paguwal	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Dokumen Proses dan Pencapaian Paguwal yang Dyeptin	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	28 Nila	100%	60.000.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD)		Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	28 Nila	217.500.000
5.3.2.2.04	Evaluasi Disiplin ASN	Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Dukung Capaian Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	28 Nila	100%	63.322.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD)		Peningkatan Dimensi Kinerja dan Disiplin	28 Nila	242.000.000
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							14.000.000.000					14.000.000.000
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							14.000.000.000					14.000.000.000
5.4.2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							9.880.985.000					9.880.985.000
5.4.2.2.01	Pemenuhan Kebutuhan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Pembelajaran Urusan Pemerintahan Kecamatan, Perangkat Daerah, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi Kecamatan, Perangkat Daerah, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah Kebutuhan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi Jabatan Administrasi	Dukung Capaian Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	20% 2 Diskriman	100%	63.450.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	25%	150.000
5.4.2.2.01	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Dukung Capaian Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	20% 2000 Orang	100%	6.227.630.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	25%	6.030.000.000
5.4.2.2.02	Bertindak, Kembangkan, dan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Terseleksi untuk Kegiatan Pengembangan	Dukung Capaian Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	25% 0 Orang	100%	7.310.000.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	25%	6.762.000.480
5.4.2.2.02	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Jumlah ASN yang Terseleksi untuk Kegiatan Pengembangan	Dukung Capaian Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	Kab. Sukabumi, Cianjur, Lemburawah	25% 0 Orang	100%	7.310.000.000	PENDAPATA NABU DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kompetensi Kinerja dan Disiplin	25%	6.542.200.480
			TOTAL					34.000.000.000					45.002.414.505

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Sukabumi, sesuai dengan sifatnya adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rencana kerja (Renja) yang telah disusun ini, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan manajemen kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, harus memuat keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, antarkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tahun 2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 harus mempedomani dokumen- dokumen perencanaan lain di atasnya (RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Sukabumi, RPJMD Kabupaten Sukabumi, RKPD Kabupaten Sukabumi dan Renstra BKPSDM) dengan sebaik-baiknya dan sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku;

- c. Meningkatkan peran serta seluruh ASN Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan program kegiatan pelayanan bidang kepegawaian;
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan formal non formal, pelatihan, bimbingan teknis, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dengan ditetapkannya Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sukabumi, Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI



Ir. H. Dadang Budiman, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630503 198803 1 008